

Vol. 12 No. 1 (2024), Halaman 26-36



## PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI DESA BAHU KECAMATAN TALIABU SELATAN KABUPATEN PULAU TALIABU

Wilhelmina Yanwarin<sup>1\*</sup>, Nixon Jefres Sindua<sup>2</sup>, Muhamad Isa Ramadhan<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Negeri Manado, Indonesia

Email: [wyanwarin@gmail.com](mailto:wyanwarin@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [nixonsindua@unima.ac.id](mailto:nixonsindua@unima.ac.id)<sup>2</sup>, [muhamadramadhan@unima.ac.id](mailto:muhamadramadhan@unima.ac.id)<sup>3</sup>

Website Jurnal: <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/social-science>



Akses dibawah lisensi CC BY-SA 4.0

<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

DOI:

(Diterima: 01-01-2024; Direvisi: 03-06-2024; Disetujui: 29-06-2024)

---

### ABSTRACT

*This research focuses on handling flood disasters, the role of the government and BPBD in handling them, and the role of the community in handling them. The research method used is qualitative. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, while data analysis includes reduction, display, and verification. The research results show that the Regional Disaster Management Agency (BPBD) plays an important role in overcoming the risk of flood disasters in Bahu Village. The role of this institution includes handling disasters quickly and appropriately, coordinating with related agencies, and supporting each other. Cooperation between the government and the community is well established, and the community participates in education and outreach to create early awareness. The role of the community is very important in handling flood disasters because the community is the victim and must cooperate well with the government and related agencies in emergency response and prevention. Good cooperation will equip the community with knowledge about dealing with floods so that they can anticipate and overcome disasters that threaten people's lives.*

**Keywords:** BPBD, Countermeasures, Floods, Government, Public.

### ABSTRAK

*Penelitian ini fokus pada penanganan bencana banjir, peran pemerintah dan BPBD dalam penanganannya, serta peran masyarakat dalam penanganannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data meliputi reduksi, display, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berperan penting dalam mengatasi risiko bencana banjir di Desa Bahu. Peran lembaga ini antara lain melakukan penanganan bencana secara cepat dan tepat, berkoordinasi dengan instansi terkait, dan saling mendukung. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat terjalin dengan baik, dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan dan sosialisasi untuk menciptakan kesadaran dini. Peran masyarakat sangat penting dalam penanganan bencana banjir karena masyarakatlah yang menjadi korban dan harus bekerja sama dengan baik dengan pemerintah dan instansi terkait dalam tanggap darurat dan pencegahan. Kerja sama yang baik akan membekali masyarakat dengan pengetahuan penanganan banjir sehingga mampu mengantisipasi dan mengatasi bencana yang mengancam kehidupan masyarakat.*

**Kata Kunci:** BPBD, Penanggulangan, Banjir, Pemerintah, Masyarakat.

---

### PENDAHULUAN

Banjir merupakan peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Di Indonesia, bencana banjir terjadi hampir setiap musim hujan dan frekuensinya meningkat secara signifikan. Faktor alam seperti intensitas curah hujan di atas normal dan air pasang sangat mempengaruhi terjadinya banjir. Faktor manusia seperti penggunaan lahan yang tidak tepat, penggundulan hutan, dan pembangunan pemukiman di daerah dataran banjir juga berkontribusi terhadap masalah banjir. Banjir merupakan peristiwa terbenamnya daratan oleh air ([Rismawati et al., 2015](#)).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibentuk untuk mengatasi masalah ini. Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari kegiatan sebelum, pada saat, dan setelah bencana terjadi. Pemerintah bertanggung jawab melaksanakan penanggulangan bencana, termasuk rekonstruksi dan rehabilitasi pascabencana. Harus diberikan jaminan bahwa masyarakat dan pengungsi yang terkena dampak bencana akan diberikan layanan yang adil dan sesuai standar untuk mengantisipasi lebih banyak korban.

Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran yang memadai untuk rekonstruksi dan rehabilitasi harus terjamin bagi para korban bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana, dimana pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab melaksanakannya secara terarah.

Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang menunjang kebutuhan sehari-hari, seperti sistem drainase, pembangkit listrik, sarana transportasi, dan tempat wisata. Banjir merupakan permasalahan yang sering terjadi di Desa Bahu, Kecamatan Taliabu Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu, terutama pada musim hujan. Pada tahun 2020, banjir melanda beberapa desa di Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, berdampak pada lebih dari seribu warga dan sedikitnya 18 desa terkena dampak banjir.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga mengakibatkan timbulnya korban

jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Keputusan Menteri Nomor 17/Kep/Menko/Kersa/x/95 mendefinisikan bencana banjir sebagai suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia, atau keduanya, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, penderitaan, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan hidup, dan gangguan terhadap lingkungan hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Kementerian Kesehatan RI mendefinisikan bencana sebagai suatu peristiwa yang mengakibatkan kerusakan ekologi, hilangnya nyawa manusia, dan kemunduran kesehatan dan pelayanan kesehatan secara signifikan, sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar ([Khambali, 2017](#)). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan bencana sebagai peristiwa apa pun yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologi, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya layanan kesehatan dalam skala tertentu yang memerlukan respons dari luar komunitas atau wilayah yang terkena dampak. *Asian Disaster Center* (2003) dan UNDP (1994) juga mendefinisikan bencana sebagai suatu peristiwa luar biasa yang disebabkan oleh alam atau manusia, termasuk kesalahan teknologi, yang memicu respon dari masyarakat, komunitas, individu, dan lingkungan.

Banjir diartikan sebagai tenggelamnya daratan akibat meningkatnya volume air, seringkali disebabkan oleh meluapnya air sungai dari dasar sungai ([Bakornas, 2007](#)). Faktor-faktor seperti tutupan hutan, sedimentasi, pembuangan limbah, erosi, dan pendangkalan sungai berkontribusi terhadap kerusakan akibat banjir ([Sutrisno et al., 2021](#)). Daerah tangkapan air juga berperan dalam menentukan terjadinya banjir ([Stammel et al., 2022](#)).

Peristiwa banjir ada dua macam, yaitu peristiwa banjir/genangan dan peristiwa banjir. Peristiwa banjir/genangan terjadi di daerah yang jarang terjadi banjir, sedangkan peristiwa banjir terjadi karena limpasan air banjir dari sungai. Pengelolaan dataran banjir diperlukan untuk mengurangi kerugian akibat banjir ([Kodoatie & Sjarief, 2005, 2010](#)).

Banyak orang yang menyamakan banjir dengan genangan, sehingga sosialisasi mengenai bencana banjir menjadi kurang akurat. Banjir terjadi ketika air hujan pada saluran drainase meluap sehingga

menyebabkan air terkumpul dan tertahan pada titik yang ketinggian airnya 5 sampai lebih dari 20 cm. Banjir dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu banjir limpasan (meluapnya sungai), banjir/genangan lokal (hujan dengan intensitas tinggi), dan banjir rob/naiknya air laut ([Purbawani, 2010](#); [Sulastriningsih, Sulistyaningsih, et al., 2022](#); [Sulastriningsih, Tewel, et al., 2022](#); [Yusuf & Fauzi, 2017](#)).

Banjir limpasan terjadi ketika daya tampung sungai tidak mampu menampung air yang ada sehingga menyebabkan meluap hingga melewati tanggul sungai. Daerah perkotaan mungkin mengalami banjir karena kapasitas drainase yang tidak memadai, kesalahan saluran drainase, dan tersumbatnya sampah. Banjir/genangan lokal terjadi akibat hujan dengan intensitas tinggi dan buruknya sistem drainase. Banjir rob terjadi akibat naiknya permukaan air laut, terutama di wilayah pesisir yang mempunyai aliran sungai.

Bencana banjir tidak semata-mata disebabkan oleh hujan, melainkan oleh berbagai aktivitas manusia seperti aktivitas tata guna lahan, penggunaan air tanah yang berlebihan, pembendungan daerah aliran air, pembangunan pemukiman dan lahan pertanian di daerah dataran banjir, sedimentasi dan penimbunan sampah di dasar sungai, saluran, dan kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan sarana dan prasarana pengendalian banjir ([Siswoko, 2008](#)).

Penyebab alami banjir antara lain curah hujan yang tinggi sehingga dapat menyebabkan banjir pada sungai jika melebihi batas sungai. Fisiografi sungai seperti bentuk dan kemiringan Daerah Aliran Sungai (DAS) juga dapat mempengaruhi terjadinya banjir. Erosi dan sedimentasi pada DAS mempengaruhi kapasitas sungai sehingga menyebabkan pengendapan dan sedimentasi yang dapat menurunkan kapasitas sungai dan menyebabkan banjir bila aliran melebihi kapasitas.

Aktivitas manusia juga dapat menyebabkan banjir akibat perubahan kondisi DPS, seperti penggundulan hutan, pengolahan lahan pertanian yang tidak tepat, pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pemekaran kota, dan perubahan penggunaan lahan lainnya. Kawasan kumuh, terutama yang dibangun di bantaran sungai, menghambat aliran sungai dan berkontribusi terhadap banjir karena menumpuknya sampah di sungai. Saluran

drainase dapat terhambat oleh beberapa faktor seperti saluran masuk yang tersumbat, inlet lebih tinggi dari jalan, dan dimensi saluran drainase yang tidak memadai. Bangunan yang tidak dirawat dengan baik juga dapat menyebabkan kerusakan dan mengganggu kinerja bangunan pengendali banjir sehingga meningkatkan kuantitas banjir.

Pengendalian banjir melibatkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan pekerjaan pengendalian banjir, eksploitasi, dan pemeliharaan untuk mengendalikan banjir dan mengatur penggunaan daerah dataran banjir. Ada empat strategi dasar untuk mengelola wilayah banjir yaitu memodifikasi kerentanan dan kerugian banjir melalui zonasi atau pengaturan penggunaan lahan, mengurangi banjir melalui waduk atau normalisasi sungai, dan memodifikasi dampak banjir melalui teknik mitigasi seperti asuransi dan pencegahan banjir.

Indonesia akrab dengan berbagai jenis bencana, dan pengelolaan bencana banjir yang baik sangat penting untuk meminimalkan korban jiwa, cedera, dan kerusakan infrastruktur. Penanggulangan bencana adalah suatu proses dinamis yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, serta mencakup pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, dan kesiapsiagaan pemulihan.

Penanggulangan bencana adalah suatu proses yang bertujuan untuk mencegah dan membatasi jatuhnya korban jiwa, menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan hidup dan penghidupan korban, mengembalikan korban ke daerah asalnya, memulihkan fungsi fasilitas umum, mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut, dan meletakkan landasan bagi kelangsungan hidup masyarakat. kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan. Penanggulangan bencana dapat dikelompokkan menjadi tiga tahap yaitu prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Tahap prabencana meliputi kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Upaya preventifnya antara lain mencegah bencana dengan menghilangkan bahaya, seperti pembakaran hutan di lahan pertanian atau penambangan batu di daerah curam. Upaya mitigasi mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik, kesadaran, dan peningkatan kapasitas menghadapi ancaman. Kegiatan kesiapsiagaan meliputi penyiapan dan pengujian rencana

penanggulangan bencana darurat, pengorganisasian sistem peringatan dini, penyediaan perbekalan, pelatihan, dan penyiapan lokasi evakuasi. Peringatan dini memberikan peringatan kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya suatu bencana, menjangkau masyarakat, bersifat segera, tegas, dan resmi.

Kegiatan tanggap darurat meliputi pertolongan segera terhadap penderitaan, termasuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, penanganan pengungsi, dan pemulihan infrastruktur dan fasilitas. Bantuan darurat memberikan bantuan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan air bersih.

Tahap pascabencana meliputi kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Pemulihan meliputi pemulihan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terkena dampak bencana dengan memfungsikan kembali institusi, infrastruktur, dan fasilitas. Rehabilitasi meliputi perbaikan lingkungan hidup, perbaikan infrastruktur publik, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, serta pemulihan fungsi pelayanan publik. Rekonstruksi meliputi perumusan kebijakan dan langkah konkrit untuk membangun kembali secara permanen seluruh infrastruktur, fasilitas, dan sistem kelembagaan di tingkat pemerintah dan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Metode pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif ([Sugiyono, 2016](#)). Fokus penelitian yaitu: (1) cara penanggulangan bencana banjir, (2) peran Pemerintah/BPBD dalam penanggulangan bencana banjir, dan (3) peran masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi, tampilan data, dan verifikasi data ([Miles & Huberman,](#)

[2009](#)). Informan penelitian yaitu kepala BPBD kabupaten Pulau Taliabu, Camat Kecamatan Taliabu, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan masyarakat korban banjir.

## HASIL PENELITIAN

### Deskripsi Lokasi Penelitian

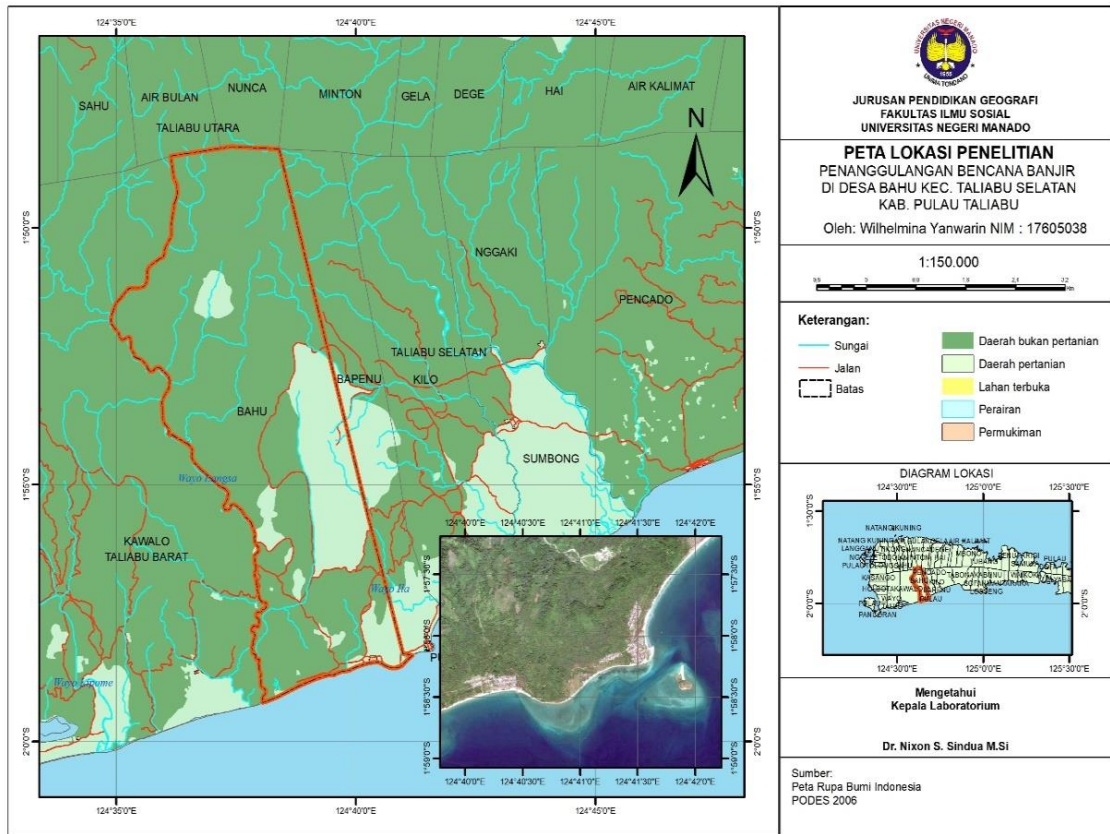
Desa Bahu yang terletak di pesisir selatan Pulau Taliabu dengan letak astronomis  $1^{\circ}58'23.2''$ LS dan  $124^{\circ}40'11.8''$ BT. Beriklim tropis dengan suhu udara  $21^{\circ}$ - $32^{\circ}$ , dan mengalami curah hujan tinggi lebih dari 100 mm setiap bulan dan lebih dari 130 hari hujan per tahun. Bulan terbasah adalah bulan Mei dengan curah hujan di atas 200 mm, sedangkan bulan terendah adalah bulan September dengan curah hujan di bawah 70 mm. Topografinya merupakan daerah perbukitan dan pegunungan tergolong rendah. Berikut peta lokasi penelitian pada [Gambar 1](#).

### Kondisi Demografi

Desa Bahu, memiliki luas wilayah 49,24 km<sup>2</sup> dengan kepadatan penduduk 19,90 jiwa/km<sup>2</sup>, berpenduduk 980 jiwa, terdiri dari 257 KK dengan 472 laki-laki dan 508 perempuan. Kelompok umur terbesar di Desa Bahu adalah remaja berusia 10-19 tahun. Tingkat pendidikan di Desa Bahu tergolong rendah, sebagian besar berpendidikan tamat SD.

Status pekerjaan warga di Desa Bahu beragam, yaitu belum bekerja 330 orang, tenaga pengajar 9 orang, wiraswasta 34 orang, petani 207 orang, nelayan 3 orang, pelajar dan mahasiswa 207 orang, pekerjaan lain 185 orang. Meski berada di dekat laut, sebagian besar masyarakat tidak memilih bekerja sebagai nelayan, yang paling banyak yaitu bekerja pada sektor pertanian dan perikanan.

Desa Bahu menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan keyakinan agama, dengan beberapa agama. Islam adalah agama yang paling banyak dianut, diikuti oleh Kristen Protestan, dan Katolik. Berikut kondisi demografi berdasarkan kelompok usia, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan agama pada [Tabel 1](#).



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Tabel 1. Kondisi Demografi Berdasarkan Kelompok Usia, Tingkat Pendidikan, Status Pekerjaan, dan Agama Desa Bahu

Usia	Tingkat Pendidikan		Status Pekerjaan		Agama /keyakinan						
	Σ	%	Σ	%	Σ	%					
0-4 Tahun	70	7,1	Tidak/belum sekolah	284	28,9	Belum/tidak bekerja	330	33,8	Islam	766	78,2
5-9 Tahun	110	11,2	Belum tamat SD	152	15,4	Aparatur Pejabat Negara	9	0,9	Protestan	155	15,8
10-19 Tahun	248	25,2	Tamat SD	287	29,2	Tenaga Pengajar	2	0,2	Katolik	59	6,0
20-29 Tahun	208	21,2	SMP	117	11,9	Wiraswasta	34	3,5	Hindu	-	-
30-39 Tahun	127	12,9	SMA	115	11,7	Pertanian dan Peternakan	207	21,2	Budha	-	-
40-59 Tahun	175	17,8	Diploma	9	0,9	Nelayan	3	0,3	Konghucu	-	-
60- >75 Tahun	45	4,6	S1	20	2,0	Agama/ Kepercayaan	-	0,0	<b>Total</b>	<b>980</b>	<b>100</b>
<b>Total</b>	<b>983</b>	<b>100</b>	S2	0	0,0	Pelajar/ Mahasiswa	207	21,2			
			S3	0	0,0	Tenaga Kesehatan	-	-			
			<b>Total</b>	<b>984</b>	<b>100</b>	Pensiunan Pekerjaan Lainnya	185	18,9			
						<b>Total</b>	<b>977</b>	<b>100</b>			

Sumber: Demografi Desa Bahu, 2021.

**Cara Penganggulangan Bencana Banjir**

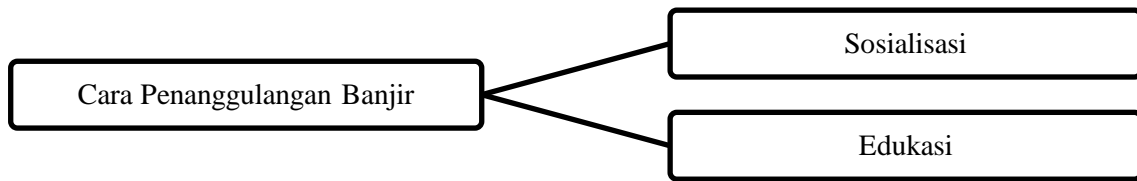
Penggalian informasi terkait bagaimana cara penanggulangan bencana banjir di desa Bahu dilakukan dengan wawancara dan hasil wawancara kemudian direduksi untuk mencari inti jawaban. Berdasarkan reduksi pada [Tabel 2](#) dan penyajian pada [Gambar 2](#) dapat di

kemukakan bahwa cara penanggulangan bencana banjir di desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu adalah dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai penanggulangan banjir.

**Tabel 2. Cara Penganggulangan Bencana Banjir**

Jawaban Informan	Inti Jawaban
<p>Wawancara 1</p> <p>Berlandaskan Kepada Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, maka kami selaku yang menangani hal tersebut harus siap siaga dan lebih baik dalam menanggulangi bencana yang terjadi seperti sosialisasi kepada masyarakat di Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan.</p> <p>Wawancara 2</p> <p>Pelayanan yang diberikan sesuai dengan peran kami sebagai pelaksana dalam menjalankan penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir. Dalam menjelaskan proses kami harus proaktif dalam melayani ketika terjadi tanggapan darurat bencana di Kabupaten Pulau Taliabu. Dalam Proses pelayanan kami juga harus lebih baik agar masyarakat dapat kami edukasi dalam mengantisipasi bencana banjir.</p>	<p>- Sosialisasi</p> <p>- Edukasi</p>

Sumber: hasil penelitian, 2022.



**Gambar 2. Cara Penganggulangan Bencana Banjir**

**Peran Pemerintah/BPBD dalam Penanggulangan Banjir**

Penggalian informasi terkait peran Pemerintah/BPBD dalam penanggulangan banjir di desa Bahu dilakukan dengan wawancara dan hasil wawancara kemudian direduksi untuk mencari inti jawaban. Berdasarkan reduksi pada [Tabel 3](#) dan penyajian pada [Gambar 3](#) dapat di kemukakan bahwa beberapa peran Pemerintah/BPBD

dalam cara penanggulangan bencana banjir di Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu yaitu melakukan penanganan evakuasi dalam hal ini korban banjir dan kordinasi agar terbentuk suatu kerjasama dalam penanganan serta memberikan bantuan kepada korban banjir. Dalam perannya juga dibutuhkan pembuatn tanggul serta himbauan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarang.

**Tabel 3. Peran Pemerintah/BPBD dalam Penanggulangan Banjir**

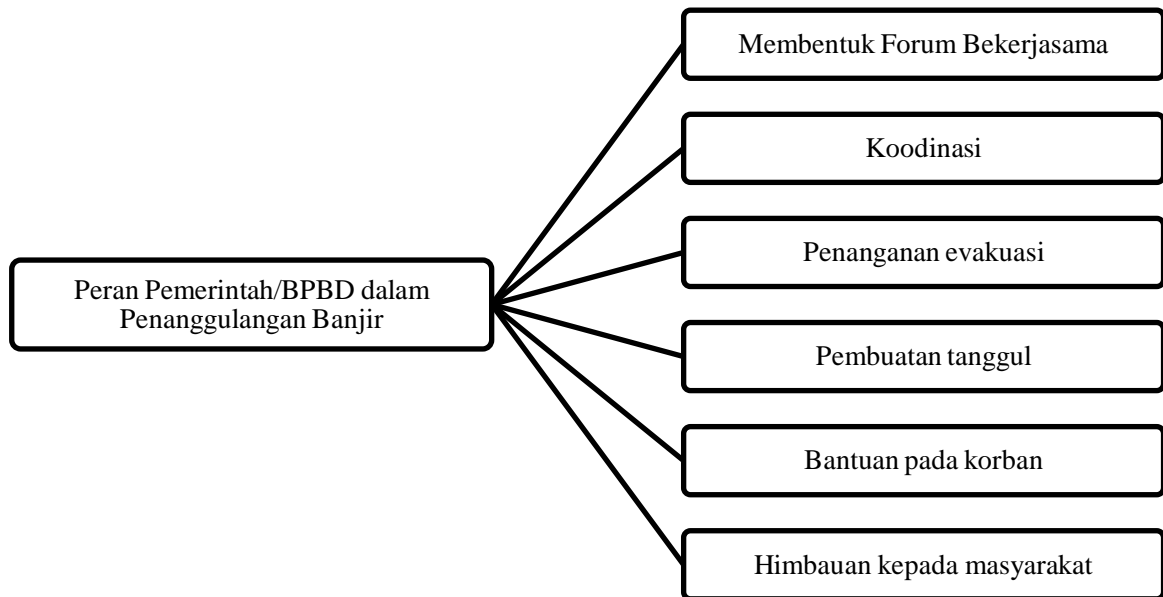
Informan	Jawaban Informan	Inti Jawaban
1	<p>Wawancara 1</p> <p>Bencana banjir yang terjadi bukan hanya tanggung jawab BPBD saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten hingga kelapisan masyarakat dalam hal ini masyarakat Dasa Bahu yang merupakan langganan banjir ketika hujan melanda maka kami membentuk forum kewaspadaan dini yang dikoordinir langsung oleh Pak Camat dan para staf serta masyarakat yang dilibatkan dalam forum tersebut.</p>	<p>- Membentuk Forum Bekerjasama</p> <p>- Koordinasi</p> <p>- Penanganan evakuasi</p>

---

<p>Wawancara 2 Kami membentuk forum kewaspadaan dini masyarakat desa Bahu sebagai salah satu langkah bahwa Pemerintah bekerjasama secara langsung dengan masyarakat desa Bahu dalam menanggulangi bencana banjir yang meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian yang besar.</p>	
<p>2 Wawancara 1 Kami selaku warga desa Bahu di ikut sertakan sebagai pengurus forum kewaspadaan dini bencana banjir yang dibentuk oleh Pemerintah Kecamatan Taliabu Selatan dan sejauh ini forum tersebut sangat bagus dalam mengkomunikasikan mencari solusi permasalahan bencana banjir yang terjadi di desa Bahu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan tanggul</li> <li>- Bantuan kepada korban</li> <li>- Himbauan kepada masyarakat</li> </ul>
<p>Wawancara 2 Saya sangat berterima kasih kepada semua pihak terkait yang telah membantu memberikan kami bahan obat-obatan, makanan dan lain-lain dalam menghadapi bencana banjir ini dan juga kerjasama Pemerintah Kecamatan, BPBD, serta Instansi/Dinas terkait sangat membantu kami dalam upaya pembuatan tanggul disepanjang bantaran sungai.</p>	

---

Sumber: hasil penelitian, 2022.



**Gambar 3. Peran Pemerintah/BPBD dalam Penanggulangan Banjir**

**Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir**

Penggalian informasi terkait peran masyarakat dalam penanggulangan banjir di desa Bahu dilakukan dengan wawancara dan hasil wawancara kemudian direduksi untuk mencari inti jawaban. Berdasarkan reduksi pada [Tabel 4](#) dan penyajian pada [Gambar 4](#) dapat di

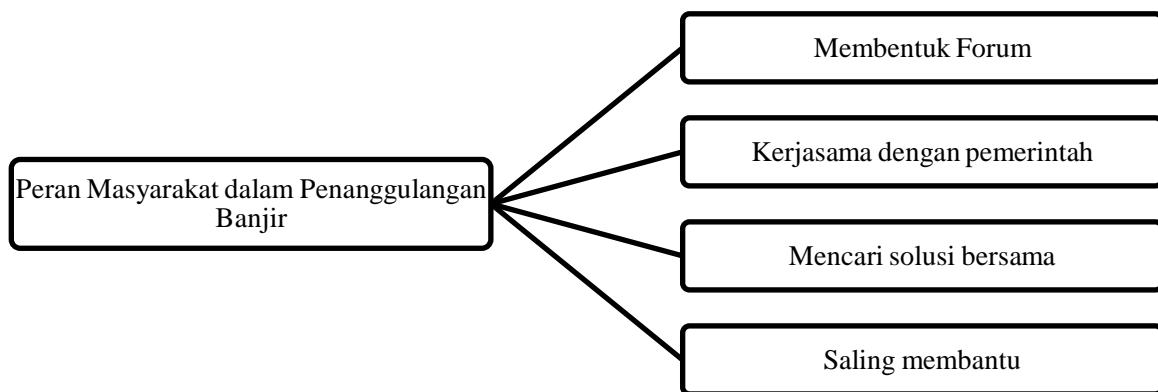
kemukakan Peran Masyarakat dalam cara penanggulangan bencana banjir di desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu yaitu masyarakat ikut membentuk forum dan bekerjasama serta mencari solusi dan membantu pelaksanaannya penanggulangan bencana banjir.

**Tabel 4. Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir**

Informan	Jawaban Informan	Inti Jawaban
----------	------------------	--------------

1	<p>Wawancara 1 Bencana banjir yang terjadi bukan hanya tanggung jawab BPBD saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten hingga kelapisan masyarakat dalam hal ini masyarakat Dasa Bahu yang merupakan langganan banjir ketika hujan melanda maka kami membentuk forum kewaspadaan dini yang dikoordinir langsung oleh Pak Camat dan para staf serta masyarakat yang dilibatkan dalam forum tersebut.</p> <p>Wawancara 2 Kami membentuk forum kewaspadaan dini masyarakat desa Bahu sebagai salah satu langkah bahwa Pemerintah bekerjasama secara langsung dengan masyarakat desa Bahu dalam menanggulangi bencana banjir yang meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian yang besar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk Forum</li> <li>- Kerjasama dengan pemerintah</li> </ul>
2	<p>Wawancara 1 Kami selaku warga desa Bahu di ikut sertakan sebagai pengurus forum kewaspadaan dini bencana banjir yang dibentuk oleh Pemerintah Kecamatan Taliabu Selatan dan sejauh ini forum tersebut sangat bagus dalam mengkomunikasikan mencari solusi permasalahan bencana banjir yang terjadi di desa Bahu.</p> <p>Wawancara 2 Saya sangat berterima kasih kepada semua pihak terkait yang telah membantu memberikan kami bahan obat-obatan, makanan dan lain-lain dalam menghadapi bencana banjir ini dan juga kerjasama Pemerintah Kecamatan, BPBD, serta Instansi/Dinas terkait sangat membantu kami dalam upaya pembuatan tanggul disepanjang bantaran sungai.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencari solusi bersama</li> <li>- Saling membantu</li> </ul>

Sumber: hasil penelitian, 2022.



Gambar 4. Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir

**PEMBAHASAN**

Penanggulangan adalah proses, cara, pembuatan menanggulangi. Cara penanggulangan bencana banjir di desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Taliabu sudah berjalan dengan baik, ini dapat di lihat dari beberapa hasil kerja yang di lakukan oleh BPBD daerah, mulai dari sosialisasi dan

edukasih yang dilakukan mengenai penanggulangan bencana banjir. Sosialisasi menurut KBBI adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan dalam lingkungan. Dalam penanggulangan bencana banjir, sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam



menghadapi bencana banjir. Sosialisasi/penyuluhan mitigasi di harapkan dapat mengurangi dampak dari bencana banjir tersebut, seperti hilangnya nyawa dan kerusakan infrastruktur, serta diharapkan masyarakat dapat diedukasi untuk mengenal permasalahan bencana banjir di tempat mereka dan bagaimana langkah-langkah yang harus di ambil dalam mengantisipasi bencana banjir tersebut.

Pemerintah ataupun BPBD mempunya tugas penting dalam penanggulangan bencana banjir, karena baik Pemerintah ataupun BPBD sebagai eksekutor di lapangan saat terjadi bencana mempunyai tanggung jawab yang di landaskan dengan undang-undang untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Konsistensi BPBD diperlukan dalam menjalankan tugasnya ([Gustiani et al., 2021](#)). Sebab masyarakat tidak dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya Pemerintah sebagai pemberi layanan dalam aspek kehidupan, dan BPBD sebagai badan yang menanggulangi bencana di daerah. Dari penelitian di lapangan yaitu dalam penanggulangan bencana banjir di Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu, Pemerintah serta BPBD telah memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penanganan evakuasi, yang dimulai dengan koordinasi serta kerjasama lalu memberikan bantuan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa BPBD berperan dalam penanganan bencana aktif ([Insyiroh et al., 2023](#)). Dalam prosesnya selain memberikan bantuan baik evakuasi maupun bantuan, Pemerintah ataupun BPBD melakukan perencanaan pembuatan tanggul penahan air dan memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan sebagai langkah mitigasi terhadap bencana banjir di desa Bahu.

Dalam penanggulangan bencana banjir, masyarakat mempunyai peran penting dalam pelaksanaannya karena bagaimanapun masyarakat adalah yang menjadi korban, termasuk pengelolaan lingkungan ([Larumpaa et al., 2022](#); [Putri et al., 2023](#); [Wania et al., 2021](#)). Dari penelitian yang dilakukan dapat di ketahui bahwa masyarakat di Desa Bahu Kecamatan Taliabu Selatan Kabupaten Pulau Taliabu antusias dalam mengikuti mitigasi penanggulangangan tersebut seperti masyarakat yang ikut tergabung dalam forum mitigasi darurat yang diselenggarakan oleh

pemerintahan setempat. Dalam prosesnya forum yang di buat bertujuan untuk berkerja sama antara Pemerintah setempat, BPBD, TNI/POLRI dan masyarakat untuk mengetahui langkah-langkah apa saja yang diambil dalam penanggulangan bencana banjir serta menjadi edukasi bagi masyarakat agar mempunyai pengalaman dalam menghadapi bencana banjir kedepannya. Dengan terjadinya koordinasi yang baik, diharapkan mitigasi yang di lakukan pun berjalan dengan baik agar masyarakat tidak lagi menderita akibat bencana banjir tersebut. Hal ini sejalan dengan upaya respon implementor pemerintah untuk turun tangan langsung sebagai tanggap darurat ([Irawan & Subowo, 2016](#)).

## KESIMPULAN

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi resiko bencana banjir di Desa Bahu telah dijalankan sesuai dengan visi-misi ini terlihat dalam peranan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menjalankan penanganan penanggulangan bencana secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Adanya koordinasi dengan instansi/dinas terkait sebagai upaya penanggulangan bencana yang didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung serta melibatkan berbagai pihak secara seimbang dalam proses penanggulangan bencana yang terjadi. Kerjasama Pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana banjir telah terjalin dengan baik sebagaimana diketahui bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyuluhan/sosialisasi dalam membentuk kewaspadaan dini masyarakat desa Bahu yang dilakukan oleh pihak kecamatan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun instansi/dinas terkait yang ikut mendukung upaya penanggulangan bencana banjir dengan pembuatan tanggul.

Masyarakat memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana banjir karena bagaimanapun masyarakat adalah korban. Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir sangat diperlukan, baik dalam tanggap darurat hingga pencegahan. Masyarakat harus bekerja sama baik dengan Pemerintah serta instansi-instansi terkait dalam penanggulangan bencana banjir seperti BPBD dan TNI/POLRI maupun instansi lainnya. Dengan adanya kerja sama yang terjalin dengan baik, masyarakat menjadi mempunyai

pengetahuan dalam menghadapi banjir yang terjadi, masyarakat pun jadi tahu langkah-langkah apa yang harus diambil untuk menghadapi bencana tersebut maupun dapat mengantisipasi serta menanggulangi bencana banjir yang mengancam kehidupan masyarakat itu sendiri.

#### SARAN

Pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar tetap konsisten dalam menjaga prinsip serta visi-misi. Pemerintah Daerah sebaiknya mengupayakan pembangunan tanggul terlebih dahulu sebagai bentuk antisipasi penahan air ketika banjir melanda. Masyarakat hendaknya ikut serta dalam membantu pemerintah untuk mencari solusi sebagai upaya pencegahan bencana banjir dengan melakukan pembersihan lingkungan serta menjaga kelestarian sungai.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bakornas, P. B. 2007. Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia. *Jakarta: Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana.*
- Gustiani, R. U., Husin, H., & Afriyanto, W. A. 2021. Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Terhadap Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Bengkulu (Regional Disaster Management Agency Preparedness for Flood Disaster Management in Bengkulu City). *Jurnal Miracle: Kesehatan Masyarakat, 1*(1), 29–41.
- Insyiroh, R., Indarti, S., & Darmi, T. 2023. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP), 5*(2), 223–238.
- Irawan, D., & Subowo, A. 2016. Peran Kelurahan Siaga Bencana Guna Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Muktiharjo Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review, 5*(2), 777–792.  
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/11261>
- Khambali. 2017. *Manajemen Penanggulangan Bencana.* Yogyakarta: Andi.
- Kodoatie, R. J., & Sjarief, R. 2005. *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu.* Yogyakarta: Andi.
- Kodoatie, R. J., & Sjarief, R. 2010. *Tata ruang air.* Yogyakarta: Andi.
- Larumpaa, K. S., Sindua, N. J., & Kaihatu, J. E. 2022. Respon Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis 3R di Desa Moronge Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud. *GEOGRAPHIA: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Geografi, 3*(1), 36–43.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. 2009. *Analisis Data Kualitatif (alih bahasa: Tjetjep Rohendi Rohidi).* Jakarta: UI-Press.
- Purbawani, I. W. D. 2010. *Aplikasi penginderaan jauh dan SIG untuk pemodelan genangan banjir di kecamatan Jebres kota Surakarta.* Universitas Gadjah Mada.
- Putri, V. Y., Sumilat, G. D., & Oroh, H. V. 2023. Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kelurahan Ketang Baru Kota Manado. *GEOGRAPHIA: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Geografi, 4*(2), 89–95.
- Rismawati, R., Usman, J., & Ma'ruf, A. 2015. Peran Pemerintah Dalam Penanggulangan Banjir Di Kecamatan Manggala Kota Makassar. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik, 1*(2).
- Siswoko, B. D. 2008. Pembangunan, Deforestasi dan Perubahan Iklim (Development, Deforestation and Climate Change). *Jurnal Manajemen Hutan Tropika, 14*(2), 89–96.
- Stammel, B., Stäps, J., Schwab, A., & Kiehl, K. 2022. Are natural floods accelerators for streambank vegetation development in floodplain restoration? *International Review of Hydrobiology, 107*(1–2), 76–87.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

- Sulastriningsih, H. S., Sulistyaningsih, M., Rifani, I., & Ramadhan, M. I. 2022. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Evaluasi Kejadian Banjir Di Kota Manado. *GEOGRAPHIA: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Geografi*, 3(1), 23–29.
- Sulastriningsih, H. S., Tewal, S. T. R., Sulistyaningsih, M., & Ramadhan, M. I. 2022. Pengaruh Perubahan Tutupan Lahan Terhadap Koefisien Limpasan (Run Off) di Kampus Universitas Negeri Manado. *Jurnal Episentrum*, 3(3), 1–8.
- Sutrisno, A., Wahyuni, E., & Titing, D. 2021. *Daya Dukung Lingkungan Daerah Aliran Sungai Kayan dan Sembakung Kalimantan Utara dalam Penyediaan Pangan dan Air*. Syiah Kuala University Press.
- Watania, H. A., Poli, E. E., & Lobja, X. E. 2021. Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Danau Tondano di Kabupaten Minahasa. *GEOGRAPHIA: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Geografi*, 2(1), 104–109.
- Yusuf, R., & Fauzi, M. 2017. *Simulasi Pompa Banjir Untuk Mengatasi Banjir Di Jalan Sei Masang Kota Dumai*. Riau University.